

BAB III
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KERAJINAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI KABUPATEN BANTUL

A. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN
DISPERINDAGKOP KABUPATEN BANTUL

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengembangan industri di daerah, terutama industri kecil dan menengah (IKM). Pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam menentukan arah kebijakan pengembangan industri, baik menyangkut pola pengembangan, macam dan jenis industri, penyelesaian masalah lingkungan, lokasi industri, dan penyusunan prioritas pengembangan maupun model-model pengembangannya.

Pengembangan industri di daerah tidak terlepas dari berbagai permasalahan; seperti sumberdaya, baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia, teknologi, ekonomi dan manajemen, lingkungan, budaya maupun aturan perundangan. Penentuan prioritas pengembangan industri, harus senantiasa mempertimbangkan dengan semua faktor di atas, sehingga terjadi kesinambungan pembangunan. Karena itu, penelitian tentang pengembangan industri di daerah Bantul masih sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam penentuan arah pembangunan industri. Ketidaktepatan arah kebijakan akan menyebabkan kemunduran sektor industri.

Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten di DIY yang memiliki tingkat perkembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang relatif lebih tinggi

dibanding dengan kabupaten lain di DIY, terutama jika dibandingkan dengan perkembangan IKM yang terdapat di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul.¹ Khusus untuk industri dengan bahan baku kulit, IKM jenis ini merupakan satu-satunya di DIY, meski kemudian dalam perkembangannya telah menyebar di tempat lain.

Keberadaan industri di Bantul, terutama IKM sangat penting. Berdasar pada data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul tahun 2010, sektor industri ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 51.459 orang atau sebesar 30 % dari total usia produktif tenaga kerja Kabupaten Bantul dimana 19%-nya secara keseluruhan terdapat pada industri kulit.² Baik secara langsung maupun tidak, dengan demikina keberadaan IKM telah memperluas kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja.

Dilihat dari sisi yang lain, industri di Bantul sebagian besar merupakan industri dengan tingkat investasi awal yang relatif cukup kecil dalam skala industri. Menurut catatan pemerintah Kabupaten Bantul, sebanyak 63,33 % industri di Kabupaten Bantul pada awalnya dibangun dengan modal investasi dibawah 50 juta rupiah dan hanya 13,33% industri yang investasi awal lebih dari Rp 200 juta.³ Berdasar pada sisi permodalannya, industri di wilayah Bantul termasuk kriteria industri kecil sampai menengah. Meski dengan investasi awal

¹ Fajriyanto, dkk, *Karakteristik Industri Besar dan Sedang di Kabupaten Bantul*, Tim Pusat Penelitian Eksakta Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, ISSN: 1410-2315, Jurnal LOGIKA, Vol. 1, No. 2, Juli 2004

² Sumber: Lihat <http://disnakertrans.bantulkab.go.id/tenaga-kerja>. Situs ini diakses pada 27 Juni 2011.

³ Fajriyanto, dkk, *Karakteristik Industri*, ibid, Jurnal LOGIKA, Vol. 1, No. 2, Juli 2004

yang kecil, industri di Kabupaten Bantul telah secara signifikan menyerap tenaga kerja.

Untuk mengembangkan IKM yang terdapat di Kabupaten Bantul, pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) secara kualitatif merumuskan dan menetapkan lima program⁴. Pertama, Disperindagkop akan menyelenggarakan pelayanan yang baik terhadap keperluan pengembangan perindustrian, perdagangan dan koperasi. Pada ranah ini, Disperindagkop membuat program untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Bantul. Selain itu juga, dengan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kedua, pengembangan koperasi. Secara umum IKM selalu dihadapkan pada masalah permodalan, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bantul melalui Disperindagkop melakukan fasilitasi terhadap masalah permodalan yang dihadapi IKM. Hal ini agar IKM di Bantul mampu bersaing dengan wilayah lain, termasuk juga pasar luar negeri. Diantaranya terdapat program peningkatan investasi yang dilakukan juga diharapkan mampu menyerap investasi agar para pemilik modal bersedia menanamkan investasinya di Bantul.

Ketiga, peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi industri kecil dan kerajinan. Para pelaku industri dalam era globalisasi ini dihadapkan pada persaingan usaha yang ketat, agar dapat bersaing juga dengan industri yang lain dan tetap maju, para perajin harus memiliki bekal dan kreatifitas sehingga produk-

⁴ Laporan Tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, Tahun 2010, hal 3

produk yang dihasilkan para perajin selalu *up to date* dengan perkembangan zaman. Para perajin mengetahui dan mampu memenuhi selera pasar.

Keempat, pengembangan perdagangan dan sistem distribusi. Pemerintah membuat pasar-pasar kerajinan, Pasar Gabusan adalah salah satu terobosan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantul membantu dan ikut memasarkan produk-produk kerajinan di Bantul. dan terakhir, kelima, pengembangan usaha dan lembaga perdagangan. Program kebijakan yang kelima ini masih berkaitan dengan program keempat. Namun program ini dilanjutkan dengan, setelah pada ranah produksi sudah dapat diselesaikan, pemerintah melakukan perlindungan terhadap konsumen. Untuk selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam empat (4) bidang yang dimiliki oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul.

1. Bidang Koperasi

Pada bidang koperasi, pada tahun 2010 Disperindagkop Kabupaten Bantul membuat tiga rumusan kebijakan yang diterjemahkan dalam beberapa kegiatan utama dan kegiatan turunan sebagai program. Kegiatan tersebut merupakan ujung dari capaian target yang harus terealisasi pada tahun anggaran berjalan, sedang pada kegiatan turunan, hal tersebut merupakan kegiatan pendukung sehingga capaian target pelaksanaan program kegiatan utama dapat terselenggara dan terealisasi dengan baik.

Pertama, program penciptaan iklim usaha yang kondusif. Disperindagkop Kabupaten Bantul pada program membuat dua sasaran utama, yaitu melakukan fasilitasi terhadap pengembangan UMKM dan melakukan monitoring dalam

perkoperasian yang berkait dengan IKM. Fasilitasi ini menempatkan Disperindagkop Kabupaten Bantul sebagai fasilitator, sedang para pengelolanya adalah tetap para perajin. Artinya, fasilitasi yang dilakukan adalah, Disperindagkop melakukan fasilitasi terhadap keberadaan koperasi sehingga perajin tidak lagi kesulitan, terutama dalam masalah pembinaan dan permodalan.

Selanjutnya, Disperindagkop dalam setiap tahunnya melakukan evaluasi dan pelaporan program dari pengembangan UMKM di Kabupaten Bantul yang telah difasilitasi oleh koperasi yang ada. Adanya evaluasi akan menghindarkan dari terjadinya penyalahgunaan terhadap pengelolaan koperasi. Hal penyalahgunaan ini pernah terjadi, koperasi Ekokapti yang pernah didirikan oleh para perajin kulit saat ini telah mati. Usaha untuk mendirikannya sudah dilakukan, seperti mendirikan koperasi Setyo Rukun dan Karya Sejahtera. Akan tetapi hingga saat ini usaha untuk merehabilitasi atau menghidupkan kembali koperasi yang khusus menangani industri kulit belum dapat dilakukan. Karena itu, Disperindagkop saat ini melakukan pematangan koperasi, yang berasal dari paguyuban Manding Manunggal Makmur. Paguyuban ini untuk menjembatani dua kelompok perajin Setyo Rukun dan Karya Sejahtera yang sebelumnya terpecah.

Kedua, menjadikan koperasi sebagai sistem yang harus mendukung program pengembangan bagi UMKM. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bantul melalui Disperindagkop merancang dua program, yaitu (a) melakukan pemantauan terhadap pengelolaan sumber dana yang berasal dari pemerintah terhadap UMKM di Bantul. Pemerintah dalam hal ini tidak dibatasi oleh pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat dan provinsi, termasuk lembaga-lembaganya dan perguruan

tinggi. Pasca gempa bumi 27 Mei 2006 lalu misalnya, Bank Indonesia memberikan bantuan permodalan bagi UMKM di Manding, terhadap 70 Kepala Keluarga perajin kulit dengan bantuan sebesar 7,5 juta dalam bentuk mesin dan 4,5 juta dalam bentuk uang tunai. Koperasi juga berkewajiban (b) melakukan pembinaan terhadap industri rumah tangga yang termasuk dalam kategori IKM. Dan koperasi juga turut serta dalam (c) melakukan promosi produk-produk hasil kerajinan.

Ketiga, pada program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Disperindagkop merencanakan programnya dengan (a) melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pembangunan koperasi, (b) meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian, (c) melakukan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi, (d) melakukan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, (e) melakukan penyebaran model-model pola pengembangan koperasi, dan terakhir (f) memberikan pelatihan manajemen koperasi.

2. Bidang Penanaman Modal

Pada program bidang penanaman modal, Disperindagkop Kabupaten Bantul tidak mencanangkan program yang terlalu banyak. Sebab pada dasarnya, berdasar pada laporan tahunan Disperindagkop tahun 2010, program-program yang dilakukan oleh disperindagkop lebih terfokus pada permodalan mandiri dari setiap usaha industri rakyat. Pada bidang ini, pemerintah kabupaten Bantul hanya memprogramkan satu program besar yang kemudian dijabarkan dalam sub-sub program. Program tersebut adalah peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

Pada program ini, sub-sub program tersebut diantaranya adalah (a) melakukan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN (Penanam Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanam Modal Asing). Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dalam usaha penanam modal di Bantul. (b) Untuk sosialisasi dan meningkatkan kapasitas penyerapan pasar, Disperindagkom juga menyelenggarakan pameran investasi. Hal ini dilakukan untuk menarik pemilik modal agar membuat usaha dan menanamkan modalnya di Bantul. Ketiga (c) dari misi investasi. Sub program ini bertujuan untuk, agar para investor melakukan investasi pada program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedang kegiatannya dapat melalui penyelenggaraan workshop-worshop potensi investasi. Pada ranah ini ini pemerintah melakukan sosialisasi tentang potensi-potensi yang dimiliki daerah, dengan demikian agar terdapat sinergi antara program pemerintah Kabupaten Bantul dengan investasi yang masuk.

3. Bidang Perdagangan

Pada bidang perdagangan, Disperindagkop Kabupaten Bantul merumuskan dua program utama. Pertama, program perlindungan konsumen dan pengamatan perdagangan. Pada bidang ini terdapat lagi dua sub program, yaitu; peningkatan pengawasan barang-jasa dan melakukan pelatihan perdagangan luar negeri. Hal ini terkait, industri kerajinan kulit di Bantul tidak saja bersaing dengan industri kulit yang ada didalam negeri seperti di Bandung dan Tanggulangin (Sidoarjo, Jawa Timur), tetapi juga dengan negara-negara dengan IKM yang cukup kuat, terutama China. Karena itu selain para pengrajin harus mampu menciptakan produk yang lebih spesifik dan kualitas dengan standar internasional, pemerintah membantu dalam melakukan pemasaran, dalam hal ini perdagangan.

Kedua, pada program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. Program ini terbagi dalam empat sub program penjabaran. Pertama, melakukan fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha. Kedua, pengembangan kelembagaan kerjasama dan emitraan pengelolaan Pasar Seni Gabusan. Ketiga, peningkatan sistem dan jaringan informasi. Dan keempat, pengembangan pengelolaan pergudangan. Bidang ini masih terkait dengan bidang yang lain, terutama pada penanaman modal. Bidang perdagangan juga disinergikan dengan bidang penanaman modal.

4. Bidang Industri

Pada bidang industri. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Disperindagkop membuat tiga program utama, yaitu: (a) peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi, (b) pengembangan industri kecil dan menengah, serta terakhir program (c) peningkatan kemampuan teknologi industri. Program peningkatan IPTEK sistem produksi ini dijabarkan lagi dengan program pengembangan kapasitas pranata, pengukuran dan standarisasi, pengujian dan kualitas hasil-hasil kerajinan. Artinya, meski hanya dianggap hanya merupakan industri rumahan, hasil kerajinan harus telah memenuhi standar yang berlaku.

Sedang pada program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), program ini dijabarkan lagi dengan program yang lebih spesifik, yaitu, pertama, fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumberdaya. Kedua, penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang IKM. Ketiga, memberikan kemudahan izin usaha IKM dan keempat melakukan pemberdayaan keluarga miskin dilokasi sekitar kegiatan industri. Demikian juga pada bidang program peningkatan kemampuan teknologi industri, pemerintah Kabupaten Bantul merencanakan program pembinaan kemampuan teknologi industri terhadap para pengrajin dengan berbagai pembinaan dan program-program yang dilaksanakan.

B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN DISPERINDAGKOP KABUPATEN BANTUL

1. Bidang Koperasi

Menurut data resmi yang dikeluarkan oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul, setidaknya disetiap Rukun Tangga (RT) atau disetiap dusun di Kabupaten Bantul hampir dipastikan terdapat kelompok simpan-pinjam, meski kebanyakan kelompok simpan-pinjam ini dikelola oleh mereka para ibu rumah tangga atau kaum perempuan. Hal ini sebenarnya dapat menjadi modal utama bagi berdirinya suatu koperasi. Keberadaan kelompok simpan-pinjam ditingkat masyarakat tersebut dapat menjadi sarana pengembangan ekonomi masyarakat, yang dikelola secara mandiri dari, oleh dan untuk warga itu sendiri guna meningkatkan kesejahteraannya.

Kelompok-kelompok simpan-pinjam yang dikelola oleh ibu-ibu anggota PKK Dusun maupun RT tersebut sangat potensial. Dalam pengelolaannya, ketentuan simpan pinjam diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Hal yang terpenting bagi kelompok simpan-pinjam tersebut adalah kesinambungan, kelompok simpan-pinjam dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi anggotanya untuk meningkatkan usaha dan berdampak meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan untuk membentuk suatu koperasi yang berbadan hukum dilakukan sesuai dengan proses perjalanan selanjutnya. Hal inilah yang menjadi perhatian penting Disperindagkop Kabupaten Bantul.

Bidang koperasi Disperindagkop Kabupaten Bantul saat ini dikepalai oleh Tri Murdianani, SE. Baginya, kelompok-kelompok simpan-pinjam yang telah ada di Bantul merupakan kekuatan penting permodalan yang dihadapi para pelaku industri, terutama industri dalam skala rumah-tangga (*home industry*). Karena itu pada tahun 2010 Bidang Koperasi Disperindagkop Kabupaten Bantul melaksanakan banyak kegiatan dalam upaya peningkatan kelompok simpan-pinjam ini. Perhatian pemerintah terhadap kelompok ini sama seperti perhatian yang dilakukan kepada koperasi, sebab pengelolaan kelompok simpan pinjam ini telah memiliki kesamaan dengan pengelolaan koperasi.

Berkaitan dengan koperasi yang secara khusus ditujukan untuk industri kulit di Manding, dalam penelusuran peneliti tidak ada koperasi yang secara khusus menjadi naungan dari jenis industri ini. Tetapi yang ada adalah koperasi yang menaungi semua jenis industri kerajinan di Manding. Barangkali Manding lebih dikenal dengan industri kulit, akan tetapi sesungguhnya terdapat banyak jenis industri di Manding, seperti mebel (kayu), kaca (untuk aquarium) dan gerabah.⁵

Bentuk permodalan untuk industri kerajinan kulit di Manding selama ini masih terpolakan pada kelompok simpan-pinjam. Baik kelompok simpan-pinjam yang dikelola oleh para ibu-ibu PKK maupun oleh paguyuban-paguyuban yang dibentuk oleh para pengrajin sendiri seperti paguyuban Setyo Rukun dan Karya Sejahtera. Namun demikian sesungguhnya telah terdapat koperasi khusus para pengrajin kulit, yaitu Ekokapti. Akan tetapi koperasi ini telah lama tidak aktif (mati). Namun jika ditelusuri, orang-orang dalam dua paguyuban pengrajin kulit

⁵ Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh bapak H. Jumakir, ketua paguyuban kerajinan di Pedukuhan Manding.

(Setyo Rukun dan Karya Sejahtera) berasal dari para pengelola koperasi Ekokapti. Dua paguyuban tersebut merupakan dua faksi dalam pengrajin kulit, yang dahulunya tergabung dalam koperasi Ekokapti. Dua paguyuban ini sekarang dicoba untuk disatukan dalam paguyuban Desa Kita yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Harapannya, paguyuban ini selain untuk menyatukan unsur-unsur yang berbeda, paguyuban Desa Kita kedepan akan dijadikan koperasi.⁶

Selain perhatian terhadap kelompok simpan-pinjam yang dikelola oleh ibu-ibu PKK di Manding, dan juga pada Paguyuban Setyo Rukun serta Karya Sejahtera, pemerintah juga memperhatikan mereka yang tergabung dalam Pokdarwis (kelompok sadar wisata). Tidak dapat dipungkiri bahwa Manding telah dikenal sebagai tempat wisata, karena itu pengelolaan wisata dikelola oleh paguyuban ini. Paguyuban ini juga berperan penting dalam membantu permodalan bagi para pengrajin kulit di Manding.

Keberadaan paguyuban industri kulit di Manding sangat membantu industri lain di Bantul dengan prestasinya ditingkat nasional, industri kulit di Bantul mendapatkan peringkat 10 se Indonesia. Karena itu melalui Bidang Koperasi Disperindagkop Kabupaten Bantul, industri kecil di Bantul mendapatkan alokasi bantuan sebesar 500 juta yang berasal dari dana anggaran biaya tambahan (ABT) dari dana pengembangan koperasi berupa perkuatan permodalan dengan suku bunga murah yang ditujukan untuk permodalan industri kecil.⁷

⁶ Keterangan ini dikemukakan oleh H. Jumakir, ketua paguyuban pengrajin kulit

⁷ BERITA – Disperindagkop Bantul. Senin, 25 Okt 2010 08:29 WIB

2. Bidang Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan tersebut dimaksudkan sebagai laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, ini merupakan suatu indikator yang penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dan berguna untuk menentukan arah kebijakan pembangunan.

Idealnya, setiap proses pembangunan termasuk di daerah didasarkan atas kemampuan sendiri (*self reliant development*) dengan mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang dimiliki. Namun keinginan seperti itu sangat sulit diwujudkan. Kondisi objektif menunjukkan bahwa daerah-daerah biasanya mengalami kesulitan dalam membangun perekonomian karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbelakangan teknologi dan kekurangan modal.

Dari ketiga hal tersebut yang sering mendapat perhatian lebih adalah masalah kekurangan modal. Dalam konteks inilah pemerintah daerah memandang perlunya menempuh kebijaksanaan yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada sektor swasta, baik domestik maupun asing, untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Adapun bentuk partisipasi ini adalah penanaman modal atau investasi.

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan pembangunan sehingga investasi pada hakekatnya juga merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Swasta telah memainkan peranan penting dalam membentuk pola

pembangunan di daerah. Investasi ini akan menyebabkan terbentuknya modal daerah (*regional capital formation*). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari terbatasnya sumber daya, teknologi dan modal yang dimiliki oleh daerah. Karena itu aktivitas investasi memiliki peran penting bagi pembangunan daerah.

Melihat ini, pemerintah daerah Kabupaten Bantul mewadahi aktivitas investasi dalam kawasan atau pusat-pusat pengembangan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan sistem produksi, distribusi dan pemasaran secara komprehensif, khususnya pada daerah yang mempunyai keunggulan dan kekhususan. Karena itu pemerintah daerah Kabupaten Bantul tidak menutup diri dari investasi, baik investasi dalam negeri maupun asing. Investasi terhadap industri di Kabupaten Bantul selama tahun 2010 cukup besar. Disperindagkop Kabupaten Bantul, mencatat total penanaman modal dari investor dalam negeri sebesar Rp 173 miliar.

Sasaran penanaman modal dalam negeri sebagian besar berada di wilayah yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta, di antaranya Kecamatan Sewon, Banguntapan, dan Kasihan. Investor dalam negeri yang masuk ke Kabupaten Bantul di antaranya dari Bali dan Sumatera, kemudian dari Pulau Jawa sendiri. Modal yang ditanam untuk memajukan usaha suatu perusahaan. Investasi inilah yang diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga di Bantul. Jumlah tenaga kerja lokal atau dari warga Bantul dan sekitarnya yang menjadi karyawan di perusahaan dengan modal dalam negeri sebanyak 3.510 orang, sedangkan tenaga kerja asing lima orang. Pemerintah Kabupaten Bantul mensyaratkan berdirinya perusahaan di Bantul harus seratus persen tenaga

kerjanya adalah warga sekitar, kecuali untuk bidang keahlian tertentu yang tidak tersedia di Bantul.⁸ Selanjutnya, untuk seberapa besar penanaman modal asing di Bantul, peneliti belum mendapatkan data seberapa besaran investasi tersebut, akan tetapi dilihat dari capaian peningkatan dan pengembangan ekspor, data Disperindagkop mengungkapkan sebesar Rp. 14.617.500,-.⁹

Besaran investor dalam negeri maupun asing tersebut tidak sepenuhnya terbatas pada industri kulit, tetapi juga untuk industri-industri yang lain. Khusus untuk industri kulit, para investor asing yang ada di Kabupaten Bantul banyak diantaranya datang dari Australia, Perancis, USA dan Belanda. Akan tetapi menurut pendapat dari H. Surame,¹⁰ terdapat juga investor yang berasal dari Spanyol. Para investor ini datang ke Bantul, mereka menyewa tempat-tempat milik orang-orang lokal yang digunakan dalam produksi. Kegiatan ini tidak banyak terjadi di Manding, akan tetapi berada disekitar Tembi dan ditempat-tempat lain seperti Sewon dan Banguntapan. Investasi asing ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

⁸ Berita ANTARA, 31 Desember 2010, Lihat *Penanaman Modal di Bantul Rp 173 Miliar*, Situs <http://www.bnisecurities.co.id/index.php/component/newscustomers/?id=1293806948133>

⁹ Laporan Tahunan Disperindagkop Kabupaten Bantul Tahun 2010 , hal 21

¹⁰ Wawancara dengan H. Surame, pengusaha-ketua pengrajin kulit di Manding, pemilik Showrom "Candy".

3. Bidang Perdagangan

Saat ini, pola pengembangan industri di Kabupaten Bantul menggunakan pola pendekatan kluster. Pengertian kluster sendiri merupakan aglomerasi usaha yang membentuk kerja sama strategis dan komplementer, serta memiliki hubungan yang intensif. Karena itu di Bantul terdapat nama daerah sentra industri. Hal ini yang digunakan dalam pengelolaan dan pengembangan industri kulit di Bantul. Karena itu, nama Manding selalu identik dengan industri kerajinan kulit.

Pola pendekatan kluster ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas, inovasi, dan penguatan struktur serta mempermudah pembinaan dan pengawasan. Pilihan pendekatan ini sekaligus memelihara eksistensi industri kerajinan kulit yang cukup potensial. Pendekatan kluster ini merupakan upaya mengembangkan kerja sama perdagangan dengan daerah lain sebagai akselerasi pengembangan industri kecil menengah secara terfokus dan terarah, serta meningkatkan promosi dan jaringan usaha perdagangan internasional.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong untuk menjadikan hasil industri kulit sebagai salah satu produk unggulan dari Kabupaten Bantul. Peluang usaha industri berbahan baku kulit dapat dilihat antara lain dari meningkatnya volume produksi dan ekspor (untuk pasar luar negeri). Dalam kondisi perekonomian yang sekarang sering dinyatakan sedang lesu dan menurunnya daya beli masyarakat, pasar ekspor industri kulit justru mengalami peningkatan. Pada

tahun 2010, pertumbuhan perdagangan industri kulit sebesar 20% dari tahun 2009.¹¹

Khusus pada industri kulit di Manding, dengan *brand image* Manding sebagai daerah sentra industri kulit, pemerintah daerah dapat dengan lebih mudah melakukan *branding image*. Melalui Disperindagkop, Manding dikenal sebagai salah satu daerah wisata. Sebagaimana telah disebut, fokus pengembangan wisata di Bantul saat ini agaknya tidak lagi hanya terbatas pada wisata pantai, yang kemudian ditunjang keberadaan wisata kuliner pantai, tetapi juga wisata hasil dari kerajinan. Keberadaan Manding yang berada pada jalur utama perjalanan wisata ke pantai Parangtritis telah memudahkan pemerintah daerah melakukan promosi perdagangan. Apalagi pasca terjadinya gempa bumi 27 Mei 2006 lalu, semakin banyak lembaga-lembaga domestik maupun internasional yang memberikan perhatian dan bantuan dalam berbagai bidangnya, kerajinan kulit di Manding Bantul semakin mendapat perhatian.

Diluar upaya tersebut, pemerintah juga membangun Pasar Seni Gabusan (PSG). Pasar ini dirancang sebagai jalan akses pengrajin ke pasar internasional. Karena itu PSG memiliki kekhususan dan tidak seperti pasar lain. Pasar ini didesain untuk menampung semua hasil kerajinan di Bantul dimana kerajinan kulit menjadi salah satu unggulannya. Pasar ini disiapkan setidaknya untuk menampung 444 usaha pengrajin yang telah memiliki kemampuan yang sudah disertifikasi dan diakui dunia internasional. Perancangan bangunan pasar ini tak hanya melibatkan arsitek dalam negeri saja, tetapi juga mancanegara, tentu

¹¹ Lampiran Laporan Tahunan Disperindagkop Kabupaten Bantul Tahun 2010 , hal vi

dengan menonjolkan arsitektur lokal. Pasar ini sedikitnya terdapat 16 los, yang memajang dan menjual seni-seni yang dihasilkan pengrajin Bantul.

4. Bidang Industri

Peran pemerintah daerah sangat besar dalam mengembangkan semua potensi daerah termasuk komponen-komponen pendukung dari pembangunan, karena pemerintah daerah dianggap paling memahami potensi yang berada di daerahnya. Sehingga potensi tersebut dapat dijadikan aset atau modal dalam menjalankan program pembangunan daerah serta dapat tercapai tujuan dari pembangunan nasional. Industri kerajinan kulit merupakan salah satu industri kecil di Kabupaten Bantul yang sedang tumbuh dan berkembang, serta termasuk potensi unggulan dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Kerajinan ini menyerap banyak pekerja sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yang selalu menjadi permasalahan pemerintah selama ini.

Model pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi pengusaha kerajinan kulit adalah pendampingan dengan pendekatan individu. Namun, pada tataran tertentu pendampingan dengan pendekatan individu tidak dapat dilakukan, karena adanya keterbatasan sumber dana dan daya yang dimiliki pemerintah. Oleh karenanya, dibutuhkan model pendampingan dengan pendekatan kelompok. Akan tetapi, perlu terlebih dahulu ditumbuhkan kesadaran kepada pengusaha kerajinan kulit akan pentingnya kelompok usaha bersama (proses pembelajaran kelompok) agar mereka dapat mengakses program-program pemberdayaan dari berbagai pihak melalui dampingan berkelanjutan. Upaya-upaya pemberdayaan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendal yang dihadapi pengusaha kerajinan kulit, antara lain:

- a. Mengikutsertakan para perajin kulit dalam pameran baik ditingkatkan lokal, nasional maupun internasional.
- b. Magang atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan desain dan mutu produk. Pada paruh kedua tahun 2010 (Juli-Desember), pemerintah melakukan pelatihan terhadap para pengrajin. Kebijakan ini juga dilanjutkan pada paruh pertama 2011 ini (Januari-Juni). Pemerintah Kabupaten Bantul, melalui Disperindagkop mengirimkan para perajin yang dipilih, yaitu 4 orang setiap bulan untuk belajar di Tanggulangin (Sidoarjo, Jawa Timur). 4 Orang ini belajar selama 1 bulan.
- c. Melakukan promosi melalui internet maupun pembuatan leaflet/brosur, profil industri kerajinan kulit
- d. Melakukan sosialisasi dan fasilitas dan fasilitas merk dagang kepada pengusaha kerajinan kulit
- e. Pembangunan saran dan prasarana seperti: balai latihan kerja atau unit pelayanan teknis bagi industri kerajinan kulit.
- f. Mengembangkan show room produk industri kerajinan kulit di Kabupaten Bantul.
- g. Pemberdayaan forum klaster, dimana pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam industri kerajinan kulit, seperti para pengusaha kerajinan, trader/pedagang perantara, supplier, lembaga keuangan/perbankan ,

lembaga pendidikan, dan pemerintah melalui forum klaster sebagai wadah kerjasama antar komponen tersebut.

TABEL 5
REALISASI KEBIJAKAN DISPERINDAGKOP
TERHADAP INDUSTRI KULIT MANDING

No	KEBIJAKAN (Rencana)	IMPLEMENTASI	REALISASI SEKTORAL
1	Bidang Koperasi: a. Revitalisasi kelembagaan koperasi b. Pemda mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi c. Bantuan Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan kerangka regulasi yang menjamin kelangsungan usaha - Pemberdayaan koperasi - Penciptaan iklim usaha yang kondusif - Bantuan pembiayaan koperasi - Penyuluhan dan pelatihan koperasi - Pendirian koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi permodalan dengan memberi bantuan lunak awal melalui Bank Pasar Bantul tanpa agunan dan bunga rendah (<i>program rutin tahunan</i>). - Memberikan dana bergulir kepada koperasi (<i>sesuai kebutuhan</i>) - Memberikan dana bergulir kepada kelompok maupun kepada individu melalui Disperindagkop Kabupaten Bantul. (<i>program rutin tahunan</i>) - Menghidupkan kembali koperasi Ekokapti, Setyo Rukun dan Karya Sejahtera (<i>program ini belum berhasil karena terjadi konflik internal pengurus koperasi</i>)
2	Bidang Penanaman Modal: Membuka investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi dalam negeri - Pameran Investasi - investasi asing - Kemudahan izin investasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu lancarnya pembayaran bagi pengrajin yang melakukan ekspor. - Memperkenalkan layanan perdagangan internasional melalui pelayanan <i>Ekspedisi Ekspor-Import On The Spot</i>. - Membuka Pusat Informasi Bisnis dan Teknologi (PIBT) bekerjasama dengan Intel Indonesia Corporation. (<i>pengelolaan berkala</i>)
3	Bidang Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan kalender tahunan promosi produk daerah. - Pasar Seni Gabusan - Peningkatan kapasitas system dan jaringan informasi perdagangan - Pasar <i>showroom</i> Manding 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Pasar Seni Gabusan sebagai pasar sentra kerajinan - Mendorong Pasar Manding sebagai pusat pariwisata industri kulit sebagai wisata primer pantai parangtritis - Pelatihan dan pemasaran bagi UMKM sektor industri kerajinan - Pengiriman delegasi pengrajin ke pameran-pameran baik yang berskala regional, nasional, ataupun internasional sebagai sarana promosi secara rutin
4	Bidang Perindustrian: Pembinaan terhadap pengrajin	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan inovasi produk, pembinaan kemampuan teknologi industri - Pendidikan dan pelatihan dasar (lingkup lokal) - Bantuan peralatan industri - Pembinaan kapasitas standar produk dan kualitas industri - Kemudahan izin usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman pengrajin magang dalam pelatihan peningkatan keterampilan desain dan mutu produk. Pada tahun 2010 (Juli-Desember), melakukan pelatihan di Bantul. Pada tahun 2011 (Januari-Juni) mengirimkan 4 perajin untuk belajar di Tanggulangin (Sidoarjo, Jawa Timur) - Sosialisasi dan fasilitas dan fasilitas merk dagang kepada pengusaha kerajinan kulit (<i>program tahunan</i>) - Mengembangkan show room produk industri kerajinan kulit. (<i>sesuai dengan kebutuhan</i>) - Memberdayakan forum klaster sebagai fasilitasi yang mempertemukan perajin dengan trader/pedagang perantara, supplier, lembaga keuangan/perbankan, lembaga pendidikan sebagai forum kerjasama. (<i>sesuai dengan kebutuhan</i>)

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN DISPERINDAGKOP KABUPATEN BANTUL

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, Pemerintah Daerah dituntut untuk memperhatikan berbagai macam faktor. Arus informasi dan komunikasi perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi pemahaman yang berbeda antara isi kebijakan yang diberikan oleh pusat dengan persepsi aparat pelaksana di daerah. Diperlukan pula dukungan sumber daya maupun *stakeholders* yang terkait dengan proses implementasi kebijakan di daerah. Diperlukan juga pembagian tugas maupun struktur birokrasi yang jelas di daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses implementasi suatu kebijakan. Selain itu juga diperlukan nilai-nilai yang dapat dianut atau dijadikan pegangan oleh pemerintah daerah untuk menerjemahkan setiap kebijakan yang harus diimplementasikan.

Sebagaimana telah dibahas dalam kerangka teori diatas (pada bab 1), terdapat tiga hal pokok dalam kebijakan, yaitu: formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik, sebab pada tahap implementasi inilah terdapat implikasi atau dampak-dampak kebijakan tersebut terjadi. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu: (a)bureaucratic structure(struktur birokrasi), (b)resources (sumber daya), (c)disposition (sikap pelaksana) dan (d)communication (komunikasi).

Oleh karena itu, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Dua hal ini harus didukung oleh hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi dan karakteristik kemampuan agen pelaksana. Dengan demikian, kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, artinya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi. Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui variabel atau faktor-faktor mempengaruhinya.

Pertama, faktor *bureaucratic structure* (struktur birokrasi). Secara khusus pemerintah daerah Kabupaten Bantul melalui Disperindagkop telah mendorong

tumbuh dan berkembangnya industri kulit yang paling mendasar, yaitu menyediakan kerangka regulasi yang menjamin lapangan permainan yang sama bagi setiap usaha. Pengaturan ini dilakukan untuk menjamin persaingan yang sehat dan terbuka bagi industri kulit.

Dalam perspektif otonomi daerah terdapat masalah keterpaduan yang harus terus menerus dikembangkan. Pada akhir dapat dilihat, industri kerajinan kulit di Manding menjadi salah satu unit usaha unggulan daerah. Program pembinaan terhadap pengrajin misalnya, hal ini telah menciptakan iklim usaha yang kondusif karena para pengrajin lokal telah memiliki skill kemampuan dalam bersaing dengan usaha lain sejenis pada daerah-daerah lain. Sebab dalam kenyataan persoalan iklim bagi industri kecil, terutama kerajinan seringkali sangat terkait atau tergantung dengan sektor lainnya. Oleh karena itu pemerintah daerah telah berusaha untuk menciptakan iklim yang kondusif melalui dukungan kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap persoalan dan kepentingan daerah, sehingga industri dapat tumbuh dan berkembang baik dari sisi lembaga maupun usahanya.

Dari sisi yang lain, pemerintah daerah juga melakukan revitalisasi kelembagaan koperasi. Sebagaimana dijelaskan, program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan koperasi yang sesuai dengan jatidiri koperasi, dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip perkoperasian. Namun pada saat dalam bentuk formalnya mengalami kebuntuan, pemerintah mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi dalam bentuk yang lain. Hal lain yang paling unik di Kabupaten Bantul adalah berdirinya paguyuban-paguyuban yang juga bergerak dalam membantu permodalan. Artinya, dengan kebijakan perbantuan yang dilakukan, masyarakat

telah secara mandiri dapat menrejemahkan prinsip koperasi. Artinya, koperasi tidak hanya dalam bentuk formalnya, tetapi prinsip-prinsipnya yang dilakukan.

Hal ini dilakukan karena, secara umum misalnya terdapat sekitar 30 persen dari sebanyak 445 koperasi di Kabupaten Bantul tidak berkembang. Salah satu faktor penyebabnya adalah manajemen pengelolaan yang tidak profesional dan minimnya regenerasi pengurus koperasi. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul, Tri Saktiyana. Menurutnya, koperasi yang tidak berkembang tersebut keberadaan menyebar di 17 kecamatan di Bantul, terutama di dusun-dusun yang memang sedikit peminat menjadi anggota. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada koperasi simpan pinjam, namun juga lembaga mikro keuangan syariah maupun Baitul Mal wa Tamwil (BMT) akibat tidak memiliki kemampuan manajerial yang profesional. Di Manding sendiri, yang berada pada pusat kota, koperasi tidak dapat berkembang, akhirnya alternatif-alternatif tersebutlah yang dipilih.

Paguyuban di tingkat lokal mengandalkan gotong royong bersama antar masyarakat sehingga relevan diterapkan. Untuk memberi stimulan dana terhadap permodalan dan koperasi yang tidak berkembang, pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2010 menganggarkan dana hibah sebesar Rp 1 miliar. Khusus untuk koperasi, kriterianya harus memiliki badan hukum jelas, berpotensi berkembang jika ada kucuran dana, dan minimal menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT).

Kedua, faktor *resources* (sumber daya). Faktor sumber daya mempunyai peranan penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan, karena

bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan dan aturan suatu kebijakan, akan juga ditentukan oleh para pelakunya, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Sumber daya terpenting dalam pengaruhnya terhadap implementasi antara lain mencakup: pelaku yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan posisinya serta lingkungan yang mendukung.

Pada sumberdaya yang harus dimiliki pemerintah, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Termasuk alokasi anggaran untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Selanjutnya, terdapat kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang dikehendaki, demikian juga fasilitas dan sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi kebijakan tersebut

Diluar itu, kemampuan masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengandalkan sumber daya pengetahuan yang dimilikinya sehingga pemberdayaan merupakan partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif. Perlu dimaklumi juga bahwa konsep pemberdayaan (*empowerment*) muncul karena adanya dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan. Sehingga dengan demikian pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Para pelaku industri kulit di Bantul, maupun pemerintah daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Disperindagkop telah memiliki sinergi. Sehingga, baik masyarakat pengrajin kulit di Manding dan pemerintah dapat bersama-sama mengembangkan usaha kerajinan, meski tidak terbatas pada kerajinan kulit. Pemberdayaan dan penataan usaha mikro di sektor informal yang pemerintah daerah lakukan saat ini telah memperkuat keberadaan industri kulit di Manding. Dukungan dan perlindungan melalui penerbitan Perda, dukungan perkuatan permodalan melalui dana bergulir, sarana usaha, pelatihan, bimbingan manajemen, sosialisasi, dan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadikan pelaku industri kulit di Manding lebih mandiri.

Selanjutnya, saat ini untuk semakin memperkuat, pemerintah melakukan pengembangan lembaga diklat untuk menyiapkan orang-orang terlatih di bidang industri kecil ini. Program ini bertujuan untuk mengintensifkan peranan lembaga-lembaga diklat bagi peningkatan kualitas industri masyarakat, terutama pada

peningkatan keterampilan, manajerial, perkoperasian dan kewirausahaan yang responsif terhadap tuntutan dunia usaha dan perubahan lingkungan strategis. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kegiatan produktif KUKM sehingga tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha yang berkeunggulan kompetitif dan memiliki produk yang berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan mutu, dan lain-lain

Ketiga, faktor *disposition* (sikap pelaksana). Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Saat ini peneliti melihat, meski masih terdapat banyak catatan, implementasi kebijakan industri kerajinan sudah cukup tepat. Dalam dinamika perkembangan sentra industri menjadi kluster bisnis industri melalui berbagai usaha pendekatan, termasuk perkuatan dukungan finansial dan non finansial. *Disposition* sentra-sentra yang ada selanjutnya dapat berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan, dan menjadi penggerak atau lokomotif dalam pengembangan ekonomi lokal. Keberadaan GMT diharapkan dapat secara lebih fokus, kolektif dan efisien, karena dengan sumberdaya yang terbatas mampu menjangkau kelompok industri yang lebih luas. Pelayanan pemerintah dan respon masyarakat sesuai bidang yang dikuasai dengan pendekatan best practises, dan berorientasi pada pasar, cekatan (responsiveness) dan inovatif.

Keempat, faktor communication (komunikasi). Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan relasi usaha dan bisnis, yaitu bagaimana hubungan yang dilakukan oleh para pelaku usaha kearajinan kulit.

Saat ini, baik pemerintah maupun para pengrajin kulit sedang bersama untuk melakukan penguatan jaringan pasar produk industri. Pemerintah memfasilitasi industri kulit dalam memperluas akses dan pangsa pasar melalui pengembangan dan penguatan lembaga pemasarannya, seperti GMT (Gabusan, Tembi dan Manding), serta pengembangan jaringan usaha termasuk kemitraan, dengan memanfaatkan teknologi (teknologi informasi). Bagian dari kemitraan adalah bentuk-bentuk kerjasama yang inovatif, dengan prinsip yang saling menguntungkan antara industri yang ada di Bantul. Termasuk dalam kegiatan ini adalah memperkuat jaringan warung masyarakat kedalam pola grosir, sehingga dapat memperkuat daya tawar dalam pengadaan produknya serta dapat diefektifkan sebagai *outlet* dan sekaligus *inlet* dari produk-produk industri kulit di Manding.